

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung identik dengan konflik global. Saksikan deklarasi WHO tentang Covid-19 sebagai pandemi global. Pandemi ini membutuhkan konvoi dan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan untuk menstabilkan perekonomian Nasional. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau penanggulangan ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau stabilitas sistem keuangan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rincian Postur Negara dan Anggaran Tahun 2020. Selain itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar di Provinsi atau Beberapa Kabupaten/Kota dan diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang memuat kebijakan PSBB meliputi: 1) libur sekolah dan tempat kerja, 2) pembatasan kegiatan keagamaan, 3) pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum, 4) pembatasan kegiatan sosial dan budaya, 5) pembatasan moda transportasi, dan 6) pembatasan kegiatan yang berkaitan dengan e-aspek pertahanan dan keamanan.

Dampak Virus Corona atau covid-19 nampaknya berdampak pada perekonomian Indonesia yang mengarah pada kontraksi penuh sebesar 2,97% selama nilai yang dibutuhkan mencapai kisaran, 5% hingga 6% selama triwulan tersebut, 1(T1), awal bulan april dimana diberlakukannya peraturan physical distancing dan PSBB mulai berlaku. Bank Global memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 2,1%. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kebutuhan makroekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari beberapa peristiwa,

yaitu : pertama, pada April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan Karyawan telah diberhentikan atau diberhentikan (Pemutusan Hubungan Kerja). Kedua, industry penerbangan kehilangan sekitar Rp 207 miliar pendapatan, dimana Rp 8 miliar pendapatan yang hilang berasal dari penerbangan China. Ketiga, jumlah wisatawan mengalami penurunan 6.800 kedatangan per hari, terutama pengunjung China. Keempat, dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengalami penurunan hingga 50%. Sebab, jumlah devisa untuk pariwisata menurun dibandingkan tahun lalu. (Sihaloho,2020).

Menurut statistik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2020), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 6,11%. Dibandingkan dengan tahun lalu. Pada bulan Maret jumlah kunjungan wisman sebanyak 70.989 orang, sedangkan pada bulan Februari jumlah kunjungan wisman sebanyak 863.960 orang. Penurunan jumlah tersebut dikarenakan adanya penutupan akses keluar masuk dalam negeri dan beberapa wilayah sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus selama pandemi juga berimbas pada sector pariwisata di masing-masing daerah. Pemberlakuan PSBB tentunya juga membentuk tingkat pendapatan di sector pariwisata yang juga menurun dibandingkan sebelumnya.

Sumber PAD juga merupakan sumber keuangan daerah yang diambil dari daerah yang bersangkutan termasuk sumber hasil pajak daerah, karena pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dan PAD gabungan Undang-Undang lainnya. Salah satu sumber dana daerah yang dapat digunakan untuk penggalan adalah PAD (Sobandi, 2005: 26). PAD merupakan pendapatan asli daerah yang potensial di daerah dna dikelola oleh pemerintah daerah yang berwenang. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah adalah PAD yaitu hasil pajak daerah yang pertama; Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak pada umumnya adalah pajak yang dipungut oleh Negara atau pemerintah kepada masyarakat atas dasar Undang-Undang yang bersifat memaksa dan dibayarkan kepada yang membayarnya tanpa secara langsung mengembalikan kinerja (*counter performance/reward*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000, pengertian pajak daerah sebagai iuran wajib pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi dan kepala daerah tanpa imbalan orang pribadi yang seimbang dapat diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah. Kebijakan, pemerintah dan pembangunan daerah. Kedua, retribusi daerah: Retribusi daerah adalah jenis pendapatan daerah yang dipungut dalam bentuk pembayaran atau imbalan perorangan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Ketiga, hasil pengelolaan asset di kawasan terpisah, dan keempat, khususnya pendapatan Pokok Daerah (PAD) lain yang sah.

Peningkatan PAD dapat dicapai jika ada peningkatan asal usul yang mempengaruhinya, dengan menggunakan sarana untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan kawasan. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Beberapa pajak daerah yang dipungut oleh daerah, terutama untuk instansi dan kota, adalah: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu (7) Pajak Parkir (8) Pajak Air Tanah (9) Pajak wallet (10) Pajak Pembangunan Tanah (11) Retribusi Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemulihan. Melaksanakan Undang-Undang perpajakan daerah dan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran menetapkan dua jenis daerah yang potensial untuk dikembangkan dengan lebih memperhatikan komponen pendukungnya, yaitu sector jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurut Widyaningsih (2014). Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah, dengan pajak daerah menunjuk sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan berbagai jenis pendapatan. Tujuan yang lebih penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah suatu badan usaha yang menyediakan jasa akomodasi/peristirahatan termasuk jasa-jasa lain yang terkait dengan dipungut bayaran, antar lain hotel, losmen, gubuk wisata, motel, dan sejenisnya. Dan pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh restoran dan penggunaan restoran berarti tempat usaha makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, termasuk restoran, kafetaria, katin, konter restoran, bar, dan lain-lain, termasuk pelayanan makanan.

Dikutip dari *website* DPRD DKI Jakarta, (2020) Pemprov DKI Jakarta harus bersiap dengan penurunan penerimaan pajak, realisasi pajak daerah yang akan dikurangi dan dampaknya terhadap PAD yang sudah kita putuskan kemarin (Rp. 50,01 Triliun). Menurut peneliti, hal ini masuk akal karena tingkat pusat juga melakukan hal yang sama, sehingga tentunya daerah lain akan menyusul begitu juga dengan Virus Corona yang melanda dunia saat ini.

Pada 2020, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan Parawisata DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia mengatakan, penerapan pajak hotel, restoran dan hiburan turun signifikan akibat pandemi virus corona (Covid-19). Padahal, ketiga lini usaha tersebut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Dia mencontohkan pajak hotel yang mematok target hampir Rp 2 triliun dalam APBD 2020, pencapaiannya hingga akhir Mei 2020 hanya Rp 66 miliar. Jumlah ini sekitar 23 persen dari target. Sedangkan untuk sector makanan dan minuman, pajak yang terutang pada Mei 2020 sebesar Rp 1,057 miliar. Pajak Restoran ditetapkan sebesar Rp 25 triliun dalam APBD 2020. Menurut catatan Cucu, 6.169 restoran dan 637 hotel tutup selama periode PABB DKI. Selama ini 100% bisnis hiburan tutup, jumlahnya mencapai 1.503 (Bisma Septalisma, 2020).

Penelitian ini ingin mengetahui seberapa penting kontribusi masing-masing jenis penerimaan pajak yang diteliti terhadap PAD dan seberapa efektifnya. Efisiensi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan, semakin tinggi rasionya maka semakin tinggi efisiensinya. Tarif ditetapkan menggunakan standar minimum. Jika tingkat keberhasilannya 100% atau 1 (satu) pencapaian yang sama menggunakan target yang terkena dampak, maka sangat efektif. Jika angka tersebut dibawah standar keberhasilan, maka dapat dikatakan tidak efektif

(Dotulong et al., 2014). Selain efisiensi, peneliti juga ingin mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Cara untuk mengetahui besarnya kontribusi adalah dengan membandingkan penerimaan pajak (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) untuk periode tidak termasuk dengan menggunakan pendapatan PAD untuk periode yang sama (Lamia et al.,2015).

Berdasarkan hal tersebut diatas, amak penelitian akan melakukan penelitian dengan judul. **“ANALISIS PAJAK DAERAH DKI JAKARTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan antara target dan realisasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta tahun 2018-2021 ?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta tahun 2018-2021 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan antara target dan realisasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta tahun 2018-2021 .
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta tahun 2018-2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat menguji diri sendiri dalam mengukur kemampuan dalam menguasai permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Bagi Kantor Pajak

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk terus meningkatkan pendapatan yang masuk dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan pajak di daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga hasilnya dapat lebih baik dari penelitian terdahulu.